KR-Istimewa

Para siswa peserta Pertukaran Pelajar di Malaysia berpamitan dengan Penjabat Bupati Temanggung.

DIIKUTI 12 SISWA TEMANGGUNG

Pertukaran Pelajar di Malaysia

TEMANGGUNG (KR) - Duabelas siswa dan satu guru SMA Muhammadiyah 1 Temanggung akan mengikuti perpertukaran pelajar ke Malaysia. Sebelum berangkat, mereka bertemu dengan Penjabat (Pj) Bupati Temanggung, Hary Agung Prabowo, untuk membahas berbagai hal yang bisa bermanfaatkan untuk pembangunan daerah.

Kepala SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, Eni Nur Rofiah mengatakan pertukaran pelajar sebagai bentuk perkenalan kepada siswa-siswi terkait jenjang perguruan tinggi selain sebagai bentuk pertukaran budaya. "Pertukaran pelajar dan misi perkenalan seni budaya ke Negeri Jiran dilaksanakan pada 4-8 Maret 2024," kata Eni Nur Rofiah, Kamis (29/2).

Menurutnya, dalam program pertukaran pelajar itu akan dilaksanakan dengan kunjungan ke perguruan tinggi dan sekolah menengah atas. "Kami juga akan mengikuti simposium dengan profesor yang ada di universitas tersebut, kami juga akan tukar budaya dengan anak-anak SMA di sana," ungkap Eni.

Para siswa-siswi yang mengikuti kegiatan tersebut, lanjut Eni, akan membawakan dua tarian khas Temanggung, yaitu Sorengan dan Prabu Kelana Suwandono, sebagai bentuk pertukaran budaya.

Pj Bupati Temanggung menemui peserta pertukaran pelajar di Ruang Gajah, Kantor Bupati Temanggung. Para peserta merupakan siswa-siswi dan guru SMA Muhammadiyah 1 Temanggung. Sebanyak 12 siswa-siswi dan satu orang guru pendamping. "Kami mengapresiasi langkah yang dilakukan SMA Muhammadiyah 1 Temanggung, terkait program pertukaran pelajar tersebut. Saya merasa bangga, hal yang luar biasa," ungkapnya.

Pj Bupati berpesan agar para peserta dapat menambah wawasan selama kegiatan berlangsung, serta dapat mempromosikan kebudayaan Temanggung, terutama Jaran Kepang sebagai ikon Temanggung. "Sampaikan, bahwa budaya di Temanggung ada banyak, terutama Jaran Kepang, karena hampir setiap desa di Temanggung ada Jaran Kepang," tandasnya. **(Osy)-f**

Polres Sukoharjo Amankan Rekapitulasi Suara di KPU

KR-Dok Polres Sukoharjo

Petugas Polres Sukoharjo siap mengamankan rekapitulasi suara Pemilu 2024 di tingkat kabupaten.

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo mengerahkan ratusan personel untuk mengamankan proses rekapitulasi suara Pemilu 2024 tingkat kabupaten. Pengamanan ketat dilakukan sebagai antisipasi terjadinya masalah gangguan keamanan dan jaminan kelancaran kegiatan.

Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit melalui Kasubsi Penmas Bripka Eka Prasetia dalam keterangannya, Jumat (1/3) mengatakan, rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu 2024 tingkat KPU Kabupaten Sukoharjo digelar 29 Februari 2024 hingga 1 Maret 2024. Terkait kegiatan itu, ratusan personel disiagakan guna pengamanan secara maksimal.

Menurut Bripka Eka Prasetia, Polres Sukoharjo akan berusaha secara maksimal dalam melaksanakan pengamanan rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten Sukoharjo untuk menjaga stabilitas kamtibmas. "Sekitar 200 personel kita terjunkan dalam pengamanan kali ini. Kita harapkan kegiatan berjalan dengan aman dan lancar," tandasnya.

Dengan pengamanan secara maksimal yang dilakukan Polres Sukoharjo, diharpkan rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 tingkat Kabupaten Sukoharjo dapat berjalan aman dan lancar. Bripka Eka juga mengharapkan kepada petugas pengamanan untuk melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab. **(Mam)-f**

LATIHAN DI POLRES SUKOHARJO

Keselamatan Candi 2024

SUKOHARJO (KR) - Polres Sukoharjo menggelar Lat Pra Ops Keselamatan Candi 2024 di Aula Mapolres Sukoharjo, Jumat (1/3). Operasi Keselamatan Candi 2024 digelar dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas.

Pelaksanaan Latihan Pra Operasi dengan sandi Operasi Keselamatan Candi 2024 tersebut dibuka langsung oleh Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit, serta diikuti oleh para Pejabat Utama Polres dan personel Polres Sukoharjo yang terlibat Ops Keselamatan Candi 2024.

Kapolres Sukoharjo AKBP Sigit melalui Kasubsi Penmas Bripka Eka Prasetia dalam keterangannya mengatakan bahwa pelaksanaan Lat Pra Ops dilakukan agar kesiapan Operasi Keselamatan Candi tidak ada kendala. Selain itu, agar personel benar-benar mengerti dan memahami apa yang menjadi tugas pokoknya.

Kasubsi Penmas menambahkan bahwa keamanan, keselamatan dan ketertiban berlalu lintas di jalan raya merupakan suatu hal yang mutlak didapatkan dan dirasakan masyarakat selaku pengguna jalan raya. Operasi Keselamatan Candi 2024 rencananya dilaksanakan selama 14 hari, 4-17 Maret 2024. **(Mam)-f**

'SMART CITY' DAN INFRASTRUKTUR DI KARANGANYAR

Disinkronkan dengan Usulan Masyarakat

KARANGANYAR (KR) - Berbagai usulan masyarakat ditampung dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa/kelurahan hingga kecamatan di Kabupaten Karanganyar. Usulan tentang perbaikan infrastruktur jalan muncul hampir di semua agenda musyawarah yang menghadirkan multi stakeholder. Mengemuka pula pembangunan *smart city* guna memudahkan pelayanan publik.

Ketua DPRD Kabupaten Karanganyar, Bagus Selo mengatakan perencanaan pembangunan oleh pemerintah yang disinkronisasi dengan usulan masyarakat untuk penganggaran tahun 2025 didasari rencana pembangunan daerah (RPD) Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024-2026. Hal itu mengingat tujuan pembangunan di periode tersebut adalah mewujudkan Jawa Tengah yang semakin sejahtera dan lestari. Dasar pembangunan daerah pada RPJMD 2018-2023 yang sudah diselesaikan melalui kepemimpinan Juliyatmono-Rober Christanto, tetap menjadi pertimbangan namun bukan acuan.

"Karena RPJMD sudah selesai, kita pakai RPD Pemprov Jateng. Seluruh stakeholder desa dan kecamatan berpartisipasi dalam merencanakan pembangunan. Usulan-usulan dari desa/kelurahan naik ke tingkat kecamatan disampaikan di musrenbangcam," kata legislator yang mengampu Dapil IV Karanganyar, meliputi Kebakkramat, Tasikmadu dan Jaten.

Saat menghadiri musrenbang di dapil IV Karanganyar, Bagus Selo menyampaikan pentingnya mewujudkan *smart city* dan perbaikan lingkungan hidup dalam arahan pembangunan tahun 2025 mendatang. Smart city yang diimplementasikan di bidang pelayanan publik diyakini memudahkan investasi, percepatan layanan, pengentasan kemiskinan dan mendongkrak pemakaian sarana dan prasarana berbasis teknologi informasi. "Mendorong pemakaian teknologi informasi dan digital untuk semua layanan. E-pajak, e-

KR-Abdul Alim

Bagus Selo

antrian RS, adminduk digital, nomor induk usaha dan sebagainya. Step by step dari tingkat kabupaten sampai ke desa," kata Bagus Selo, Jumat (1/3).

Ia tak memungkiri usulan perbaikan infrastruktur tetap disampaikan di musren. Di tahun 2025, keberpihakan anggaran untuk perbaikan infrastruktur jalan diyakini lebih memungkinkan. Sebab, belanja tak langsung dalam bentuk pembangunan gedung pemerintah tidak akan sebanyak tahun 2023. Ia mengimbau seluruh anggota DPRD mengikuti seluruh tahapan musrenbang sampai banggar dan eksekusi. Poin penting dari tingkat bawah diperlukan pula dalam mengisi pokok pikiran (pokir) yang akan dibawa anggota DPRD di pembahasan anggaran.

Lebih lanjut dikatakan Bagus Selo, DPRD sudah menyepakati belanja tambahan Rp24 miliar untuk menyokong program universal health coverage (UHC) di tahun anggaran 2024. Program ini solusi bagi masyarakat dalam mengakses jaminan kesehatan nasional (JKN), terutama bagi mereka yang menganggur usai dipecat dari perusahaan atau pabrik.

"Dengan tambahan Rp 24 miliar itu, total anggaran menjadi Rp50 miliar untuk UHC. Kami sudah meneken kesepakatan ini dengan BPJS kesehatan. Kasihan yang dirumahkan dari pabrik. Enggak bisa melanjutkan berobat karena tunggakan BPJS. Ini solusinya. Dinas terkait harap segera memvalidasi," ungkapnya. **(Lim)-f**

ANTISIPASI LONJAKAN HARGA BAHAN POKOK

Sukoharjo Siapkan Operasi Pasar Pangan

SUKOHARJO (KR) - Pemkab Sukoharjo berencana menggelar Operasi Pasar (OP) dengan menyediakan bahan pokok pangan. Rencana dibuat sebagai antisipasi melonjaknya harga kebutuhan pokok pangan saat puasa Ramadan hingga Lebaran nanti. OP akan digelar apabila dibutuhkan dengan terus memantau kondisi stok dan perkembangan harga dipasaran.

Bupati Sukoharjo Etik Suryani, Jumat (1/3) mengatakan, Pemkab Sukoharjo masih terus melakukan pemantauan stok dan harga kebutuhan pokok pangan dipasaran. Hal ini dilakukan mengingat adanya kenaikan harga dan dikeluhkan masyarakat.

"Kondisi tersebut dikhawatirkan masih akan terus terjadi pada saat puasa Ramadan hingga Lebaran nanti. Sebab, di saat puasa Ramadan dan Lebaran dipastikan permintaan kebutuhan bahan pokok pangan masyarakat mengalami peningkatan," jelas Etik Suryani.

Hal itu dikhawatirkan bisa memicu gejolak di masyarakat karena stok menjadi terbatas dan harga mengalami lonjakan tinggi. Karena itu disiapkan antisipasi sejak dini, salah satunya dengan menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di halaman kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Sukoharjo. GPM juga akan diperluas kegiatannya sampai ditingkat desa dan kelurahan. Hal ini dimaksudkan untuk mendekatkan bahan pokok pangan di masyarakat agar mudah dan murah dibeli.

"Operasi Pasar menjadi jalan terakhir untuk menyediakan stok bahan pokok pangan dengan harga murah. Meskipun demikian, tetap kami siapkan OP saat puasa Ramadan dan Lebaran nanti karena memang permintaan masyarakat tinggi. Sekarang dimaksimalkan menggelar GPM," tandas Etik.

Menurutnya, Pemkab Sukoharjo akan melibatkan Bulog Surakarta dalam menggelar kegiatan GPM, termasuk pelaksanaan operasi pasar pada saat puasa Ramadan dan Lebaran. Bulog Surakarta sengaja dilibatkan Pemkab Sukoharjo sebagai pihak penyedia barang bahan pokok pangan. Kebutuhan tersebut seperti beras, gula pasir, minyak goreng dan lainnya. "Untuk itu, akan segera ditentukan jadwal dan tempat pelaksanaan operasi pasar.

Terpisah, Wakil Pimpinan Cabang Bulog Surakarta, Andrew Ramadhan Shahab mengatakan, stok beras yang dimiliki Bulog Surakarta sekitar 14.000 ton hingga 15.000 ton dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat selama puasa Ramadan hingga Lebaran mendatang. Stok beras tersebut masih disimpan Bulog Surakarta, di sejumlah tempat, salah satunya di Gudang Bulog Telukan Grogol Sukoharjo. "Bulog Surakarta menganggap stok beras tersebut cukup dalam dua tiga bulan ke depan," tegasnya.

Menurutnya, Bulog Surakarta juga akan menambah stok beras melalui penyerapan hasil panen padi petani lokal di Solo Raya. Diharapkan hasil panen padi melimpah sehingga menambah banyak stok beras. "Akhir Maret atau awal April sudah panen padi petani lokal di Solo Raya. Bulog Surakarta akan bergerak melalui penyerapan panen," ungkap Andrew.

Dikatakan, stok beras disiapkan tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat pada momen puasa Ramadan dan Lebaran, tetapi juga pada hari-hari biasa. Termasuk untuk pemenuhan kebutuhan penyaluran bantuan pangan beras. **(Mam)-f**

PEREBUTAN KURSI DPRD PATI 2024-2029

Timses 'Berburu' Suara di Dapil

PATI (KR) - Penghitungan perolehan suara Pemilu 2024 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Kabupaten sudah PPK sudah selesai. Namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat sejumlah timses untuk berburu suara. Mereka saling mengintai, lalu mencari celah agar calon anggota legislatif (caleg) yang didukung bisa menambah suara lagi.

"Caleg yang merasa mendapat dukungan suara, belum benar-benar aman. Ditengarai, masih ada gerilya timses lain. Fatkurochman SH MH, Rabu (28/2). Peluang mencari suara tambahan bisa digerilya dari parpol yang tidak ada saksi," tandasnya.

Menurutnya, hampir di semua daerah oemilihan di Kabupaten Pati muncul gerilya timses caleg berburu suara tambahan. "Kondisi tersebut berpotensi menyulut protes dari pihak yang tidak diusulkan," ungkap Fatkhurohman yang juga tokoh pemuda asal Slungkep Kayen.

Sementara itu, Koordinator Presidium LSM Dewan Kota, Drs Pramudya menyatakan kondisi keresahan timses yang merasa perolehan suara *by name* masing-masing caleg dan perolehan parpol dinilai tipis dalam penentuan kursi perolehan DPRD Kabupaten Pati 2024-2029. Sebenarnya perolehan suara masing-masing caleg bisa dilihat

KR-Alwi Alaydrus

Pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 di Kabupaten Pati.

Dengan selesainya perhitungan rekapitulasi perolehan parpol dan caleg di tingkat PPK, sudah bisa dijadikan pedoman hitungan, berapa perolehan kursi parpol di setiap dapil, dan siapa saja yang berhak untuk mendapatkan *golden ticket* yang akan duduk sebagai legislator DPRD Kabupaten Pati 2024-2029," jelas Pramudya.

Disebutkan, dasar rekapitulasi perhitungan perolehan suara di tingkat KPUD Pati adalah dari berita acara (BA) rekapitulasi di tingkat kecamatan yang diakumulasi di setiap dapil. "Perolehan suara di tingkat kecamatan kalau diakumulasikan menjadi rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat kabupaten tidak akan berbeda," tandasnya.

Menanggapi keresahan caleg yang khawatir kalau nantinya yang seharusnya menurut perhitungan perolehan suara *by name* dapat menjadi legislator tetapi tidak ikut dilantik dan digantikan caleg yang perolehan suaranya di bawah caleg lain, mantan Ketua KPUD Pati tersebut mengakui, hal itu memang menghawatirkan.

"Itu bisa terjadi, karena yang bisa mengubah putusan KPUD adalah keputusan internal parpol," ungkap Pramudya. **(Cuk)-f**

DALAM PENGADAAN BARANG DAN JASA

Desa Harus Siap Gunakan E-Katalog

KEBUMEN (KR) - Pemerintah desa harus mulai bersiap menggunakan aplikasi Katalog Elektronik (e-Katalog) dalam pengadaan barang dan jasa. Kesiapan diperlukan karena dimungkinkan Undang Undang Pengadaan Barang dan Jasa Publik (UU PBJ Publik) sudah diberlakukan tahun depan.

KR-Sukmawan

Bupati Arif Sugiyanto menyerahkan kenang-kenangan kepada Kepala LKPP Hendrar Prihadi.

"Undang Undang PBJ Publik masih digodok. Dimungkinkan tahun depan sudah disahkan. Ketika UU BPJ Publik diberlakukan, maka semua aktivitas proses pengadaan barang dan jasa sampai tingkat desa harus melalui e-Katalog," jelas Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/-Jasa Pemerintah (LKPP) RI, Hendrar Prihadi, seusai membuka Sosialisasi Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang diikuti seluruh kepala desa di Kabupaten Kebumen, Jumat (1/3).

Menurut Hendrar, menjadi tugas pemerintah daerah untuk melakukan bimbingan dan pelatihan agar begitu UU PBJ Publik diberlakukan, desa sudah siap menggunakan e-Katalog dalam setiap pengadaan barang dan jasa. Terlebih lagi, anggaran di desa yang mencapai Rp 1 miliar hingga Rp 3 miliar, sering kali tidak terpakai dengan baik dan benar.

Padahal, lanjut Hendrar, jika pengadaan barang dan jasa melalui e-Katalog dipakai dengan baik dan benar, maka sisi kemanfaatannya tidak saja untuk masyarakat, namun juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi sekitar. Apalagi ada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro Kecil dan Koperasi (UMKK).

Bupati Kebumen Arif Sugiyanto memastikan, e-Katalog Lokal sudah digunakan dengan baik. Dengan e-Katalog Lokal, masyarakat yang mendapat manfaatnya, dan membuat pertumbuhan ekomoni Kabupaten Kebumen melesat. "Pertumbuhan ekomoni Kebumen sekarang lebih baik dibanding pertumbuhan ekonomi provinsi dan nasional," tandas Arif. **(Suk)-f**